



FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN; MISKIN ABU-ABU



OLEH
Siti Rohima
Muhammad Nur Budiyanto



**UNSRI
PRESS**

**FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN;
MISKIN ABU-ABU**

**Siti Rohima
Muhammad Nur Budiyanto**



**FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN;
MISKIN ABU-ABU**

Siti Rohima

Muhammad Nur Budiyanto

UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya 2024

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. 0711-360969

email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021

Anggota IKAPI No. 001/SMS/96

90 halaman : 15 x 22 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-623-399-181-0

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan buku yang berkaitan dengan FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN; MISKIN ABU-ABU.

Dalam buku ini ditampilkan beberapa teori dan konsep tentang kemiskinan, teori kemiskinan, kriteria miskin dan kemiskinan perkotaan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dimohonkan kritik dan saran demi perbaikan yang akan datang.

Palembang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Fenomena Pengentasan Kemiskinan	6
BAB II TEORI DAN KONSEP KEMISKINAN	19
2.1. Pendahuluan	19
2.2. Teori Lingkaran Kemiskinan (<i>vicious circle of povepoverty</i>)	19
2.3. Konsep Kemiskinan	30
2.4. Ukuran Kemiskinan	46
BAB III FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN	
PERKOTAAN	51
3.1. Pendahuluan	51
3.2. Faktor Penyebab Kemiskinan	52
3.2.1. Modal Ekonomi	53
3.2.2. Modal Manusia	54
3.2.3. Modal Sosial	56
BAB IV FENOMENA MASYARAKAT MISKIN	
ABU-ABU DI PERKOTAAN	59

4.1. Pendahuluan	59
4.2. Masyarakat “Miskin Abu-Abu”	60
BAB V KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	72
PROFIL PENULIS	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kriteria Miskin BKKBN dan Kondisi Masyarakat “Miskin Abu-bu”	63
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>vicious circle of poverty</i>)	24
Gambar 2.2. Penyebab Terjadinya Kemiskinan	27
Gambar 3.1. Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>vicious circle of poverty</i>)	57

BAB I

KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN

1.1.PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi pada masyarakat adalah upaya udalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan wawasan dan pengetahuan, sikap mental, serta keterampilan untuk menjadi kemandirian dan kesejahteraan. Sangat mungkin bagi masyarakat yang telah terbentuk secara meluas untuk memberikan kontribusi penting untuk pembangunan daerah dan program pembangunan nasional di Indonesia.

Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi 5,02%. Pendapatan Domestik Bruto (BPS, 2019) mencapai 15.883,9 triliun rupiah pada harga berlaku.Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pemeratakan kesejahteraan sampai lapisan bawah masyarakat, terlepas dari tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2019. Indonesia pernah mengalami resesi pada 2020-2021 saat pandemi *Covid-19* pertama kali menghantam. Secara q to q, pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam dua kuartal secara beruntun pada 2020 dan 2021 menjadikan Indonesia masuk pada fase resesi teknikal (www.dpr.go.id, 2020). Pada 2022 hingga triwulan II 2023

ini, pertumbuhan ekonomi kuartalan tercatat masih menunjukkan performa positif. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah potensial untuk menjaga pergerakan ekonomi dengan meningkatkan akses masyarakat pada layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan daya saing. Dengan demikian, roda perekonomian diharapkan semakin melejit karena mobilitas dan jalur perdagangan semakin lancar (kpbu.kemenkeu.go.id).

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan pembangunan dengan menerapkan strategi pembangunan dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UNDP (2005), pendekatan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan tidak berhasil mengatasi empat masalah pembangunan utama: (1) kondisi kemiskinan menjadi lebih buruk dan ada perbedaan yang lebih besar antara kelompok kaya dan miskin; (2) pengangguran meningkat; (3) hilangnya ikatan sosial dalam masyarakat; dan (4) kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada pendekatan pembangunan yang digunakan pemerintah.

Secara *empirical problems* masalah ini menunjukkan bahwa teori yang diterapkan (*theoretical problems*) oleh pengambil kebijakan belum berhasil menyelesaikan masalah kesejahteraan. Pada beberapa dekade terakhir,

bangsa Indonesia telah menghadapi perselisihan antara pilihan yang lebih penting, seperti pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan. Menurut teori *trickle down effect*, sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi enam persen, angka kemiskinan tetap tinggi, pengusaha kecil menjadi lebih kecil, dan kesenjangan sosial semakin lebar, teori efek menetes ke bawah tidak berhasil di Indonesia.

Pada saattahun 1997, krisis ekonomi melanda dan pertumbuhan ekonomi menurun. Namun, ekonomi usaha kecil dan menengah ternyata memberikan kontribusi nyata kepada perekonomian secara bertahap, sementara konglomerat hanya menyisakan hutang yang besar. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin mencapai 22,5 juta orang (11,34 persen) dan meningkat menjadi 49,5 juta orang (24,23 persen) pada tahun 1998. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin mencapai 37,2 juta orang, atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang, atau sekitar 9,41% dari seluruh penduduk, pada bulan Maret 2019 (BPS, 2019).

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap

Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen). Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah

sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2023).

Penetapan program pengentaskan kemiskinan adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan program tersebut. *Millennium Development Goals* (MDGs). Oleh karena itu, program ini diterapkan sehingga kebijakan dan program pemerintah lainnya dapat secara langsung menyentuh lapisan bawah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pelaksanaan program tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan melalui berbagai kesempatan berusaha, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkembang secara mandiri.

Kemiskinan bukanlah sebuah isu baru, melainkan isu yang terus ada sepanjang zaman. Kemiskinan merupakan hasil dari proses pemiskinan yang secara substansial terjadi secara beruntun, yang saling berkaitan satu sama lain. Kemiskinan adalah hasil dari proses pemiskinan yang berulang dan saling terkait. Subtansi kemiskinan didasarkan pada ketimpangan akses yang dapat diperoleh setiap segmentasi sosial masyarakat dengan porsi yang relatif sama. Akses seringkali hanya dapat diakses oleh lapisan tertentu, sementara lapisan lain sangat sulit untuk dijangkau.

Sejak tahun 1980an, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat secara signifikan di wilayah perkotaan. Pada tahun 2019, wilayah perkotaan menduduki 9,41% dari total penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2019). Angka urbanisasi yang tinggi dan mobilitas penduduk yang tinggi adalah penyebab peningkatan ini. Kondisi ini berarti bahwa penduduk kota akan mengambil alih konsentrasi penduduk perdesaan. Angka kemiskinan di kota-kota akan meningkat dengan cepat sebagai akibat dari urbanisasi yang pesat (Rohima, 2010).

1.2. FENOMENA PENGENTASAN KEMISKINAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tersebar secara merata di seluruh negeri, yang ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan yang signifikan di antara daerah-daerah (Rohima, 2009). Ini merupakan masalah utama dalam upaya pengentasan kemiskinan saat ini di Indonesia. Selain itu, kemiskinan juga merupakan hubungan sebab akibat, atau kausalitas melingkar. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya pendapatan perkapita disebabkan oleh rendahnya investasi perkapita, rendahnya permintaan domestik perkapita disebabkan oleh rendahnya tingkat kemiskinan, dan demikian seterusnya. Sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah

hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan sebagai buktinya contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia (Sumanta, 2005).

Lingkaran kemiskinan setan ini disebabkan oleh keadaan yang menghalangi pembentukan modal, padahal pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Ringkasan perangkat kemiskinan terdiri dari dua kategori: penawaran dan permintaan modal. Pertama, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung yang rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah juga menyebabkan negara kekurangan barang modal, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat produktivitas tetap yang rendah. Kedua, permintaan modal. Keinginan untuk menanamkan modal rendah di negara miskin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak banyak jenis barang yang tersedia di pasar. Selain itu, pendapatan masyarakat rendah, yang menyebabkan rendahnya produktivitas (Jhingan, 2004). Sebenarnya, ini sesuai dengan logika berpikir Nurkse dalam Kuncoro (2000), yang menyatakan bahwa "negara miskin itu miskin karena dia miskin". Pernyataan "negara miskin itu miskin karena dia miskin" sangat menyedihkan. Pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara

miskin karena tidak memiliki apa-apa, dan bahwa tidak memiliki apa-apa menyebabkan negara itu miskin.

Pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai program pengentasan kemiskinan. Di antara pemberdayaan yang telah digunakan dari masa Orde Baru hingga saat ini termasuk PPK (Program Pengembangan Kecamatan), JPS (Jaringan Pengaman Sosial), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di Indonesia, program IDT (Inpres Desa Tertinggal) menggunakan model kemitraan dua arah antara pemerintah dan agen pembaru tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengalihan. Dalam hal ini, pemerintah berada pada level perencana dan donator, sedangkan agen pembaru berada pada level implementor. Selain itu, model kemitraan yang lain adalah Takesra Kukesra, merupakan kemitraan empat arah antara pemerintah, swasta, bank dan masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, swasta menyediakan dana, bank berfungsi sebagai implementor, dan masyarakat dimotivasi untuk menabung.

Pada tahun 2011, pemerintah telah mengalokasikan dana PNPM sebesar Rp.13 triliun untuk didistribusikan ke 6000 kecamatan tambahan. Pada tahun yang sama, program KUR sebesar Rp.100 triliun telah ditetapkan

untuk membantu pembiayaan usaha kecil, yang merupakan 98,9 persen entitas bisnis di Indonesia (Kompas, 2011).

Secara teoritis, lebih banyak program penanggulangan kemiskinan akan membantu mengurangi jumlah orang miskin. Selain itu, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah harus memungkinkan pelayanan kepada masyarakat miskin yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun sayangnya, hasil penelitian yang dilakukan tentang berbagai program pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa kondisi sebelum program dimulai. Meskipun begitu banyak dana telah dihabiskan untuk program tersebut, jumlah masyarakat miskin masih terus meningkat.

Mengingat fakta bahwa banyak program pemerintah yang telah dijalankan berdasarkan fakta kemiskinan, menunjukkan bahwa program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan belum berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Masyarakat miskin akan mengalami perubahan yang sangat lambat. Kurangnya koordinasi antar departemen dan lembaga menyebabkan program tidak terpadu, penyimpangan dalam pelaksanaan, ketidakjelasan kriteria sasaran, dan kurangnya perencanaan. Selain itu, alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan sangat kecil, sehingga pelaksanaan program tersebut lebih penting daripada

pembangunan fisik. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan. Disebabkan oleh peningkatan jumlah orang miskin, jurang kemiskinan semakin lebar. Pemerintah harus terlibat, meskipun hanya sebagai fasilitator, untuk mengakhiri kemiskinan. Dalam hal ini, yang sangat diharapkan adalah partisipasi masyarakat yang aktif. Keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah partisipasi masyarakat. Gagasan cerdas yang dapat mewakili mayoritas masyarakat dan diikuti oleh mayoritas partisipasi masyarakat harus mendukung kualitas dan kuantitas ini.

Salah satu solusi yang digunakan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dapat dicapai melalui kemandirian—upaya alternatif melalui pemberdayaan. Pemberdayaan ini dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan diri manusia. Paradigma rasional berubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dan non-rasional

karena gagasan pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembalikan keseimbangan dalam dinamika kehidupan. Menurut Sulistiyani (2004), pemberdayaan adalah proses merubah individu dan masyarakat menjadi mandiri, yang berarti mereka dapat mengendalikan cara mereka berpikir, bertindak, dan berperilaku. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah perubahan peran yang dilakukan oleh masyarakat dan cara mereka berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Menurut Sulistiyani (2004), "dengan menambahkan pemberdayaan akan ideal hasilnya apabila masyarakat memiliki perilaku peduli, inisiatif, inovatif, kreatif, kerja keras, dan terbuka."

Penelitian tentang kajian dan penelitian pemberdayaan masyarakat akan dipublikasikan dalam berbagai jurnal dan artikel karena temuan penelusuran kajian penelitian yang ada menunjukkan bahwa kajian pemberdayaan masyarakat selama ini banyak diuraikan dalam berbagai perspektif dan metode. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Krisna (2010) yang berjudul *The Irrelevance of Nation Strategis? Rural Poverty, Dynamic India*. Padapenelitian ini mengkaji masalah kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dari setiap rumah tangga di pedesaan negara India.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong orang miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui stimulus. Pendapatan masyarakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; ketika tingkat kemiskinan rendah, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Selain itu, kajian penelitian Ashral (2010) yang berjudul *Female Empowerment: impact of commitment saving product in the Philippines*. Studi ini melihat bagaimana perempuan Philipina mampu menabung lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga mampu memberdayakan diri dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan. Memiliki tabungan dapat membantu membiayai kebutuhan keluarga. Dengan kemampuan setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, ketidakmampuan rumah tangga dapat diatasi dan tingkat kemiskinan dapat dikurangi.

Selanjutnya, Jensens (2010) melakukan penelitian berjudul *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembentukan Kapital Sosial di Desa Pedesaan India*. Penelitian ini juga menyelidiki pemberdayaan perempuan dengan kapital sosial di pedesaan India. Perempuan tidak hanya harus mampu menjalankan peran ibu rumah tangga mereka,

tetapi mereka juga harus mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Kepercayaan yang dibangun dalam setiap rumah tangga terhadap kerja sama satu sama lain dikenal sebagai modal sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program kerjasama perempuan yang diterapkan di rumah tangga pedesaan India dapat mengurangi kemiskinan. Perempuan India memiliki kekuatan untuk bersikap (menentukan prinsip) dan mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan melalui kerjasama desa dan kepercayaan satu sama lain. Semakin banyak perempuan India berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan untuk bangkit dari ketidakberdayaan dan keterpurukan.

Melengkapi kajian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Mojtaba (2009) yang berjudul *Role of empowerment and younght involvement in poverty eradication*. Penelitian ini mengkaji model pemberdayaan masyarakat untuk memerangi kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan generasi muda sebagai pembentuk masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa generasi muda mendorong masyarakat dan memainkan peran penting dalam perkembangan dan keberhasilan pengentasan.

Karena itu, Friedman (1992) menyatakan bahwa "ada dua tipe pemberdayaan". Pertama, pemberdayaan

individu mencakup semua anggota masyarakat atau keluarga. Jika setiap orang diberdayakan dirinya sendiri, mereka akan memiliki kemampuan untuk membuat jaringan pemberdayaan diri yang lebih luas. Yang kedua adalah pemberdayaan kelompok atau antar individu. Pemberdayaan antar individu akan membentuk ikatan kelompok, yang akan membentuk jaringan menjadi kelompok masyarakat. Pernyataan Friedman menyatakan bahwa penelitian ini hanya akan melihat pemberdayaan individu sebagai "diri" mereka sendiri. Pemberdayaan "diri" adalah pemberdayaan individu untuk mengatasi kemiskinan sehingga mereka dapat bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih baik. Masyarakat "diri" adalah aktor utama dalam pembangunan, dan pemberdayaan diri didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat mampu menopang dirinya sendiri (*self-help*), yang tercermin dalam kemandirian dan keswadayaan.

Pemberdayaan *bottom-up* adalah yang paling penting, bukan pola *top-down* yang kurang menjunjung tinggi potensi dan aspirasi swadaya masyarakat. Ini menunjukkan penghargaan terhadap komunitas yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghasilkan hasil dengan prinsip swadaya. Menurut Hamid dalam Rohima (2010), ada beberapa kekurangan program pengentasan kemiskinan, yaitu perencanaan berasal dari pemerintah pusat (*top down*): (1) seringkali tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu, (2) program dilaksanakan secara sektoral, masyarakat dianggap sebagai objek, dan (3) sulit untuk menjaga kontinuitas program, sehingga banyak program kemiskinan tidak berkesinambungan dan pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pejabat administratif. Masyarakat hanya memainkan peran kecil dalam pelaksanaan pemberdayaan, dan mereka tidak sepenuhnya terlibat dalamnya. Orang melihat masyarakat sebagai penerima bantuan dan alat yang mampu melakukan sesuatu. Selain itu, program pemberdayaan tidak bertahan lama; kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal proyek. Situasi ini adalah fenomena yang benar-benar terjadi saat ini dan menunjukkan kemampuan masyarakat miskin untuk berdiri sendiri. Namun, tidak efektif dalam mendorong kemandirian masyarakat karena implementasinya masih parsial. Menurut Kompas, 2011.

Mengingat uraian sebelumnya, pemberdayaan diri menekankan pada individu miskin untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberdayaan, bukan hanya sebagai objek atau subjek. Pemberdayaan diri diharapkan dapat menghentikan lingkaran kemiskinan yang mengerikan (juga dikenal sebagai lingkaran berputar kemiskinan) dan perangkap kemiskinan yang dialami masyarakat miskin. Peraih nobel perdamaian asal Bangladesh Muhammad Yunus pernah memberikan gambaran tentang cara

memangkas lingkaran kemiskinan melalui pinjaman modal usaha. Dia dianggap sebagai orang yang mendorong pembentukan Grameen Bank, yang berarti bank untuk orang miskin. Beliau berpendapat bahwa seseorang harus berada di pihak yang mengalami kemiskinan untuk memahami masalah tersebut. Banyak orang salah memahami bahwa kemiskinan terkait dengan keterampilan. Banyak diartikan, kesejahteraan hidup tidak dapat dicapai tanpa keterampilan. Oleh karena itu, setiap pemberi dana atau modal tidak akan memberikan pinjaman modal kepada individu yang tidak memiliki keterampilan kecuali mereka mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Menurut Yunus, gagasan ini tidak logis karena orang yang bermasalah membutuhkan modal awal untuk berusaha daripada keterampilan. Dia percaya bahwa semua orang memiliki keterampilan bawaan sejak lahir. Ada modal dan usaha yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan dan lingkaran kemiskinan akan menghasilkan keterampilan (*vicious circle of poverty*).

Selain itu, Sungkowo (2011) juga mencoba memecahkan lingkaran kemiskinan setan dengan menawarkan model pemberdayaan masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal untuk orang miskin. Studi ini dilakukan di Semarang. Pendidikan nonformal yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, terutama di tingkat lokal, akan memberikan pemberdayaan. Biaya

pendidikan nonformal untuk kaum miskin harus disesuaikan dengan kondisi wilayah serta perubahan harga barang dan jasa. Pemberitahuan yang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan keterampilan kaum miskin memungkinkan kaum miskin untuk melakukan usaha mandiri dan menemukan lapangan kerja. Usaha mandiri yang menggunakan keterampilan yang mereka miliki dapat meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan.

Jika pemberdayaan masyarakat tidak mempertimbangkan aspek kultural dan mendayagunakan peran modal sosial yang tumbuh di masyarakat untuk mempercepat dan mengoptimalkan hasilnya, pemberdayaan itu tidak akan berhasil. Coleman (1988) menyatakan bahwa "modal sosial bukan merupakan entitas tunggal (*single entity*), namun merupakan entitas majemuk (*hetero entity*) yang mengandung dua elemen pokok: (1) modal sosial meliputi struktur sosial yang didalamnya terkandung beberapa aspek dan (2) modal sosial dapat memfasilitasi terjadinya action dan habitual tertentu dari pelaku yang berada di dalam lingkungan struktur sosial tersebut." Menurut Rotberg (2001) dalam Yustika (2010), "modal sosial merupakan infrastruktur sosial yang terbangun dari interaksi warga yang didasarkan pada rasa saling percaya, bekerja sama satu

sama lain untuk mencapai tujuan bersama". Menghasilkan kehidupan yang berkeadaban (*civic culture*)".

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan diri dideskripsikan bahwa manusia sebagai "diri" *homo sociologicus* dan *homo economicus* yang akan membawa konsekuensi pada pilihan analisis yang bersifat mikro ini adalah cara kemiskinan terjadi di kota-kota. Dianggap sebagai warisan dan sejarah, kaum papah perkotaan telah menjadi masalah sosial yang mencolok selama berabad-abad sejak munculnya kota itu sendiri. Ada peningkatan tingkat penanggulangan, seolah-olah kemiskinan itu abadi dan tidak dapat dihilangkan dengan tindakan atau reformasi.

BAB II

TEORI DAN KONSEP KEMISKINAN

2.1. PENDAHULUAN

Kemiskinan memiliki banyak aspek dan berbagai perspektif yang berbeda tentang hal itu. Sebagai contoh, pendekatan sosiokultural seringkali melihat kemiskinan sebagai akibat dari budaya yang buruk di negara berkembang, seperti malas, apatis, kurang motivasi, dan kurangnya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*). Berbagai perspektif yang tersedia dalam meneliti kemiskinan memungkinkan setiap orang untuk melakukan interpretasi berdasarkan kepentingan mereka sendiri.

2.2. TEORI LINGKARAN KEMISKINAN (*vicious circle of pof povererty*)

Banyak perspektif, pendapat, dan ukuran kemiskinan akan membentuk lingkaran kemiskinan yang terus berlanjut. seperti teori lingkaran kemiskinan yang rumit yang dinyatakan oleh Nurkse. Aksesibilitas adalah faktor yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan. Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak memiliki sama sekali) pilihan untuk mengembangkan hidupnya kecuali menjalankan apa yang terpaksa saat ini yang dapat dilakukan, bukan apa

yang seharusnya mereka lakukan. Dalam situasi ini, orang harus hidup dalam kemiskinan.

Perspektif mikro menunjukkan bahwa budaya tradisional merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbelakangan atau kemiskinan. Dalam konteks ini, teori "budaya miskin" adalah ide penting. Menurut Lewis (1969), "kemiskinan muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri." Dengan kata lain, sumber kemiskinan dapat berasal dari kondisi serba miskin yang diturunkan dari generasi ke generasi atau dari sifat internal penduduk miskin itu sendiri. Perilaku dan prinsip-prinsip kemiskinan telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang miskin di tempat ini. Akhir-akhir ini, dampak yang memprihatinkan adalah sulit bagi masyarakat yang hidup dalam budaya yang miskin untuk melepaskan diri dari pengaruh budaya tersebut.

Selain itu, Lewis (1969) menyatakan bahwa "identifikasi dalam kebudayaan kemiskinan (terutama di perkotaan) adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat dengan kepadatan tinggi, terbatasnya akses terhadap barang-barang konsumsi, layanan kesehatan, dan sarana pendidikan." Berkembangnya sistem ekonomi uang, buruh upahan, dan sistem produksi untuk keuntungan adalah beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kebudayaan kemiskinan. Selain itu, masyarakat yang

memiliki institusi sosial yang lemah untuk mengendalikan dan memecahkan masalah sosial dan kependudukan mengalami pertumbuhan dan pengangguran yang tinggi.

"Dalam memahami kemiskinan dan ciri-cirinya sebagai suatu kebudayaan, atau lebih tepat sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keluarga", Lewis (1969) menyatakan. Reaksi kaum miskin terhadap posisi marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme dikenal sebagai kebudayaan kemiskinan. Selain itu, itu juga berarti penyesuaian. Kebudayaan ini menunjukkan upaya untuk mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan tanda kesadaran. Kesuksesan dalam hidup tidak mungkin dicapai jika Anda tidak sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan utama masyarakat.

Kebudayaan kemiskinan adalah adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat berstrata kelas yang sangat individualistis dan dipengaruhi oleh kapitalisme. Kelompok masyarakat yang paling cenderung memiliki kebudayaan kemiskinan adalah kelompok masyarakat berstrata rendah, yang mengalami

perubahan sosial yang signifikan yang ditunjukkan oleh karakteristik berikut:

1. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat, yang menyebabkan ketakutan, kecurigaan tinggi, apatis, dan perpecahan;
2. Pada tingkat komunitas lokal, rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan dengan tingkat organisasi yang rendah di luar keluarga inti dan keluarga luas;
3. Pada tingkat keluarga, masa kanak-kanak yang singkat dan kurangnya pengasuhan oleh orang tua dan orang tua tunggal dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada anak-anaknya;
4. Pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa rendah diri;
5. Tingkat kesengsaraan yang tinggi (rasa) disebabkan oleh penderitaan ibu, struktur pribadi yang lemah, kurangnya kendali diri dan dorongan nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kekurangan sabaran untuk menunda keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah atau tidak berguna, tingginya anggapan bahwa lelaki lebih baik

daripada mereka, dan berbagai penyakit kejiwaan lainnya.

6. Kebudayaan yang mengalami kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit terhadap kelompoknya; mereka hanya mengetahui masalah, kondisi setempat, lingkungan tetangga, dan cara hidup mereka sendiri, dan tidak memiliki kesadaran kelas meskipun mereka sangat sensitif terhadap perbedaan status.

Nurkse mengembangkan teori "lingkaran setan kemiskinan", juga dikenal sebagai "lingkaran setan kemiskinan", yang lebih menjelaskan fenomena dan penyebab kemiskinan. (dalam Jhingan, 2004). Secara makro, lingkaran setan kemiskinan ditinjau dari seseorang atau rumah tangga yang mengalami rendahnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Secara mikro, lingkaran setan kemiskinan ditinjau dari seseorang atau rumah tangga yang mengalami rendahnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan.

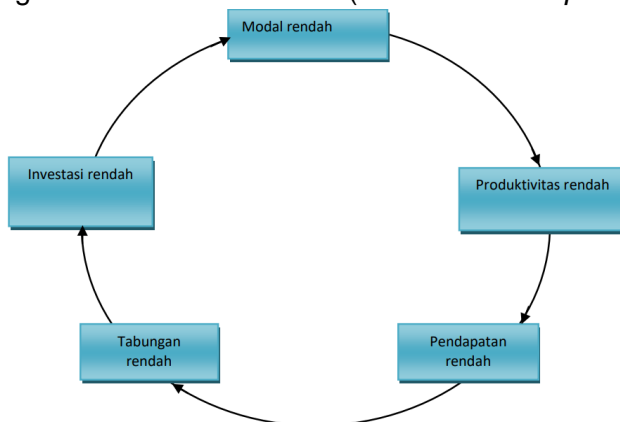
Terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan. *Pertama*, lingkaran kemiskinan setan berasal dari penawaran modal. Produksi yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat pembentukan

modal dan investasi yang rendah. Rendahnya produktivitas merupakan ujung mata rantai yang menyebabkan suatu keluarga atau individu terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Kedua, lingkaran setan kemiskinan dilihat dari perspektif permintaan. Ini berarti bahwa penurunan tingkat pendapatan akan menyebabkan penurunan tingkat permintaan, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan tingkat tabungan dan investasi, yang pada gilirannya akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan akhirnya penurunan pendapatan. Kondisi ini akan terus berlanjut dan berputar, membentuk lingkaran, yang akan membuat masyarakat terus miskin. Lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1

Lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*)



Sumber: Nurkse dalam Jhingan (2004)

Sebenarnya, pernyataan Nurkse dalam Kuncoro (2000) bahwa "negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*)" benar-benar menyedihkan. Pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa negara miskin karena tidak memiliki apa-apa, dan bahwa tidak memiliki apa-apa menyebabkan negara itu miskin. Menurut Kuncoro (2000), faktor-faktor berikut menyebabkan kemiskinan:

1. Secara makro, kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan timpang; penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan berkualitas rendah;
2. Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produktivitas yang rendah dan upah yang rendah;
3. Kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan dalam akses dan modal;

Teori lingkaran setan kemiskinan—juga dikenal sebagai "lingkaran hitam kemiskinan"—adalah dasar dari ketiga penyebab kemiskinan tersebut. Keterbelakangan atau ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, dan

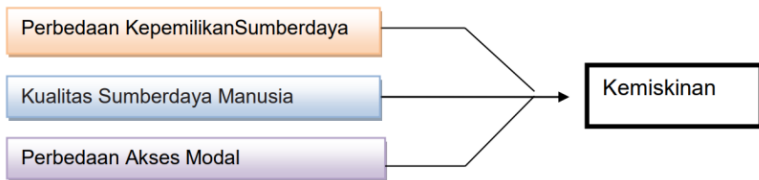
kekurangan modal adalah semua faktor yang menyebabkan kemiskinan. Ketiga komponen tersebut berkontribusi pada rendahnya produktivitas total penduduk. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan bagi orang miskin, dan rendahnya pendapatan akan menyebabkan rendahnya tabungan dan kecenderungan untuk menurunkan investasi, yang pada gilirannya akan memperburuk ekonomi dan menyebabkan keterbelakangan dan ketertinggalan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memerangi kemiskinan seharusnya ditujukan untuk "memotong" lingkaran kemiskinan.

Selain itu, Chambers (1987) mendefinisikan "perangkap deprivasi" sebagai "kompleksitas dan merupakan hubungan sebab akibat yang saling berkaitan dengan masalah ketidak berdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), dan keterasingan. "Chambers berpendapat bahwa ketidakberdayaan terkait dengan aspek perangkap lainnya. Ketidakberdayaan membatasi akses terhadap sumber daya, memperumit keadilan hukum tentang penyelewengan (pelanggaran), dan menyebabkan hilangnya kekuatan tawar menawar (kekuatan tawar menawar), dan membuat rakyat semakin rapuh terhadap permintaan pinjaman yang cepat.

Sharp et al. (1996) dalam Kuncoro (2000) menyatakan bahwa mereka berusaha untuk menemukan penyebab utama kemiskinan masyarakat dan membahas tiga perspektif. Pertama, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan pola kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas dengan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia; produktivitas yang rendah mengakibatkan tingkat upah yang rendah, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan tingkat upah yang rendah. Ketiga, disparitas dalam akses modal menyebabkan kemiskinan. Secara diagramatis ketiga penyebab kemiskinan ini dapat dijelaskan melalui Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2.

Penyebab terjadinya Kemiskinan



Sumber: Kuncoro, 2000

Nasikun dalam Suryawati (2005) menyatakan “beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu Proses yang diinduksi oleh kebijakan, misalnya kebijakan anti kemiskinan, mereplikasi proses pemiskinan yang dilestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, yang menyatakan bahwa negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, di mana petani menjadi marjinal karena petani skala besar menguasai tanah yang paling subur dan berfokus pada ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasarkan pada teori Malthus menyatakan bahwa penambahan penduduk adalah deret hitung, sedangkan penambahan pangan adalah deret ukur.
- d. *Resourcesmanagement and the environment*, Manajemen sumber daya alam dan lingkungan termasuk aspek-aspek manajemen yang tidak tepat dari sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang tidak tepat yang akan mengurangi produktivitas.

- e. *Natural cycle and processes* Kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya, tinggal di lahan kritis di mana banjir akan terjadi jika turun hujan, tetapi air tidak tersedia selama musim kemarau, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang optimal dan konsisten.
- f. *The marginalization of woman*, Perempuan dimarginalkan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga mereka tidak memiliki akses dan penghargaan yang sama seperti laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, Faktor budaya dan etnik berfungsi untuk mempertahankan kemiskinan. Misalnya, pola konsumtif yang ditunjukkan oleh petani dan nelayan selama panen raya, dan pola konsumtif yang ditunjukkan oleh upacara adat atau upacara keagamaan.
- h. *Exploitative intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- i. *Internal political fragmentation and civil strife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International processes*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.3. KONSEP KEMISKINAN

Definisi tentang kemiskinan dari sejumlah pandangan dan pendekatan yang dinamis memang tidak mudah, Ini karena para ahli dan penelitian telah membuat definisi mereka berdasarkan fokus penelitian mereka. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dengan banyak aspek. Konsep tentang kemiskinan beragam, mulai dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar dan memperbaiki keadaan hingga konsep yang lebih luas yang mencakup aspek sosial dan moral.

Konsep-konsep ini berkembang sesuai dengan evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Definisi konvensional tentang kemiskinan berfokus pada memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, tanpa mengurangi makna konsep yang telah lama digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Friedman (1979), "kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial." Namun, basis kekuatan sosial mencakup empat hal. Pertama, modal produktif, seperti tanah, rumah, dan kesehatan; kedua, sumber keuangan, seperti pendapatan; ketiga, organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama; dan keempat, jaringan sosial atau network untuk mendapatkan pekerjaan, barang, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Kelima, data yang bermanfaat untuk kehidupan.

Menurut Chambers (1983), kemiskinan dikaitkan dengan deprivasi sosial, deprivasi dari sumber daya seperti air, tempat tinggal, perawatan kesehatan dan sanitasi, pendidikan, dan transportasi. Selain itu, Chambers menyatakan bahwa "kemiskinan adalah suatu konsep yang terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependence*), (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis." Tidak hanya hidup dalam kemiskinan karena kekurangan uang dan tingkat pendapatan, tetapi juga karena tingkat kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan hukum yang tidak adil, kerentanan terhadap ancaman kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan untuk menentukan jalan hidup sendiri.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut adalah ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif adalah ketika kebijakan pembangunan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata, menyebabkan ketimpangan pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural adalah ketika sikap seseorang terhadap sesuatu dianggap sebagai faktor yang menyebabkan kemiskinan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, jenis miskin yang disebabkan oleh kurangnya akses ke sumber daya, terjadi dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat

menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (*vulnerability*) dan rendahnya harapan hidup. Oleh sebab itu, kemiskinan mempunyai banyak sisi: ekonomi, sosial dan politik (Harris-White, 2005). Penduduk miskin tidak memiliki apa-apa secara ekonomi, tidak menjadi siapa-siapa secara sosial, dan tidak memiliki hak politik selain menjadi korban pembangunan. Multidimensi kemiskinan mirip dengan kecantikan, yang didefinisikan setiap orang. Jadi kemiskinan itu tidak bisa terlepas dari aspek politik, sehingga tidak ada definisi kemiskinan yang paling benar: *There is no one correct, scientific, agreed definition because poverty is inevitably a political concept and thus inherently a contested one (Alcock, 1997)*. Strategi nafkah rumah tangga berkelanjutan (*sustainable household livelihood strategies*) merupakan salah satu upaya alternatif mengatasi kemiskinan. Definisi nafkah berkelanjutan adalah sebagai berikut: “*A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living. A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks and maintain or*

enhance its capabilities and assets both now and in the future, while not undermining the natural resource base”.

Selanjutnya, menurut Specker (1993) dalam Surjono (2007), "kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dan kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan.

Sebagaimana dikutip oleh Noverman (2000) dan Dellon (1993) dalam Surjono (2007) menyatakan ada dua perspektif untuk memahami kemiskinan.

Pertama, kemiskinan dilihat sebagai suatu "proses". Sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan hasil dari kegagalan sistem masyarakat dalam membagi sumber daya dan dana secara adil kepada anggotanya. Oleh karena itu, kemiskinan dianggap sebagai salah satu hasil dari kegagalan sistem pasar institusional dalam membagi sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia, secara adil kepada anggotanya. Menurut perspektif *World View*, kemiskinan adalah masalah struktural. Secara teoritis, kemiskinan struktural dapat didefinisikan sebagai kemiskinan

yang dialami oleh sebuah masyarakat karena akibat dari struktur sosialnya. Ini biasanya terjadi di masyarakat di mana ada jurang yang dalam antara orang kaya dan miskin. Masyarakat miskin, meskipun mayoritas, tidak mampu melakukan apa-apa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, masyarakat kaya, meskipun mayoritas, biasanya dapat menguasai dan mengontrol berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal ekonomi dan politik.

Kedua, kemiskinan sebagai fenomena atau konsekuensi sosial. Kemiskinan muncul sebagai akibat dari sumber daya yang terbatas karena kemajuan teknologi yang lambat. Dengan kata lain, variabel yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin dialami secara alami, yang berarti bahwa ada perbedaan dalam kekayaan dan pendapatan di antara masyarakat.

Menurut Soekanto (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat mempertahankan taraf hidup yang sesuai dengan kelompok sosialnya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, dan fisiknya dalam kelompok sosial tersebut. Dengan cara yang sama, Kartasmita (1996) mengatakan bahwa kemiskinan adalah masalah

pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian berkembang menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin biasanya tidak memiliki kemampuan berusaha dan memiliki akses yang terbatas ke kegiatan ekonomi. Akibatnya, mereka tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi yang lebih besar.

Senada dengan pendapat sebelumnya, Kartasmita (1996) menyatakan “sejumlah perbedaan tentang kemiskinan di suatu daerah berdasarkan pola waktu diantaranya sebagai berikut:

1. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya yang terisolasi.
2. *Cyclical poverty*, kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. *Seasonal poverty*, kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
4. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat”.

Selain berdasarkan pola waktu, Kartasasmita (1996) menyatakan kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan diantaranya sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut, yaitu seseorang dikatakan miskin secara absolut jika tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut; dengan kata lain, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang ditunjukkan oleh garis kemiskinan absolut. Untuk menentukan garis kemiskinan, kriteria yang digunakan adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mencakup 2.100 kalori per orang per hari, ditambah pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan, yang mencakup perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama.
2. Kemiskinan relatif, yaitu situasi di mana kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda dibandingkan dengan garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang lebih kaya.
3. Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti

tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan struktural, yaitu kondisi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terdapat dalam system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan.

Bjorn Hettne (dalam Trijono, 2001) mengatakan bahwa empat konsep yang sudah dikenal tentang kemiskinan dapat dihubungkan satu sama lain: kemiskinan absolute dan relatif, serta kemiskinan objektif dan subjektif. Konsep kemiskinan, baik absolut maupun relatif, mengacu pada kepemilikan materi yang terkait dengan standar kelayakan hidup. Artinya, mengacu pada perbedaan sosial yang dihasilkan dari pembagian pendapatan. Sementara kemiskinan relatif diukur berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar penduduk, kemiskinan absolut diukur berdasarkan angka-angka nyata. Perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris berhubungan erat dengan pendekatan objektif dan subjektif terhadap kemiskinan. Kebutuhan kalori adalah pendekatan objektif, sementara kemiskinan

subjektif menekankan pemahaman tentang kemiskinan dari sudut pandang orang miskin.

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani dan menjalani kehidupan bermartabat. Salah satu hak dasar masyarakat desa adalah hak untuk mendapatkan makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk melindungi hak-hak fundamental masyarakat miskin ini.

Beberapa pendekatan utama digunakan oleh Bappenas. Ini termasuk pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*), pendekatan pendapatan (*Approach to Income*), pendekatan kemampuan dasar (*Basic Capability Approach*), dan pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan kebutuhan dasar mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang, keluarga, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka. Kebutuhan minimum ini termasuk makanan, pakaian, papan, layanan kesehatan, pendidikan, dan akses ke air bersih dan sanitasi. Pendekatan Pendapatan menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat

produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, yang berdampak langsung pada pendapatan seseorang dalam masyarakat. Metode ini menggunakan standar pendapatan ketat untuk membedakan kelas sosial.

Pendekatan kemampuan dasar menggambarkan kemiskinan sebagai kekurangan kemampuan dasar, seperti kemampuan membaca dan menulis, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan yang terbatas ini menghalangi orang miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan subyektif, yang juga dikenal sebagai pendekatan kesejahteraan, menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan ini melihat kemiskinan dari perspektif orang miskin sendiri.

Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai dimensi. SMERU dalam Suharto (2004) menyatakan dimensi kemiskinan sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan)
- b. Tidak terdapat akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, transportasi)

- c. Tidak terdapat jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terjadi pada guncangan yang bersifat individual maupun massal
- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat
- g. Tidak terdapat akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, janda miskin, wanita korban kekerasan)

Kemiskinan, terutama kemiskinan di kota, terkait erat dengan kurangnya peluang kerja. penduduk, baik pendatang (urbanis) maupun orang baru yang tinggal di kota, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kehidupan kota untuk menciptakan kesempatan kerja. Dari perspektif ekonomi, ada banyak cara untuk melihat kemiskinan (Yasa, 2005):

- a. Secara makro, kemiskinan yang disebabkan oleh metode kepemilikan sumber daya yang

tidak setara, yang menyebabkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumberdaya terbatas dan kualitasnya rendah.

- b. Kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan dalam kualitas sumber daya manusia. Penduduk miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menghasilkan upah yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang tidak beruntung, diskriminasi, atau keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Jumlah penduduk miskin yang meningkat di daerah perkotaan juga dipengaruhi oleh arus migran yang kuat. Pengeluaran serendah-rendahnya di daerah tujuan (kota) untuk menabung untuk dibawa pulang ke daerah asal (kampung halaman) adalah perilaku para migran dalam kehidupan kota. Para migran menghabiskan hanya sebagian kecil uang mereka di daerah tujuan, dan sebagian besar dari mereka memiliki pendapatan rendah karena kualitas sumber daya manusia yang buruk. Salah

satu ciri kemiskinan perkotaan adalah munculnya permukiman kumuh.

Berdasarkan berbagai pendapat, kemiskinan dapat dipahami dari berbagai aspek: ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental manusia, yang tentunya berdampak negatif terhadap pembangunan negara yang sedang berkembang. Selain itu, kemiskinan terkait dengan pandangan masyarakat, budaya hidup, dan lingkungannya. Dalam istilah lain, kemiskinan struktural didefinisikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintahan, yang membuat mereka lemah dan tereksplotasi. Namun, biasanya, kemiskinan material dimaksudkan ketika orang berbicara tentangnya. Dalam hal ini, apabila seseorang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk hidup secara layak, seseorang dianggap miskin. Ini adalah apa yang sering disebut kemiskinan konsumsi.

Meskipun definisi ini sangat membantu dalam menciptakan indikator orang miskin, definisi ini tidak memadai karena: (1) tidak cukup memahami jenis kemiskinan yang sebenarnya; (2) dapat membawa orang ke kesimpulan yang salah bahwa hanya dengan menyediakan pasokan makanan yang memadai adalah

cara terbaik untuk memerangi kemiskinan; dan (3) tidak bermanfaat bagi para pemimpin ketika mereka harus membuat kebijakan lintas sektor, bahkan mungkin tidak produktif.

Tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan adalah beberapa faktor saling berkaitan yang mempengaruhi kemiskinan. Kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki atau perempuan tidak terpenuhi hak asasi mereka untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat disebut kemiskinan. Selain itu, kemiskinan biasanya hanya diukur dari materi, seperti tingkat pendapatan, bentuk rumah, fasilitas yang dimiliki, dan sebagainya.

Seandainya ini sesuai dengan pemahaman multidimensional tentang kemiskinan, maka kemiskinan tidak hanya diukur dari penghasilan, tetapi juga mencakup kerentanan individu atau sekelompok individu untuk menjadi miskin serta keterbatasan akses ke masyarakat miskin yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, kemiskinan seharusnya dipahami tidak hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya diukur secara fisik atau materi, tetapi juga diukur secara non-fisik atau non-materi, seperti kepercayaan, keamanan dari perlakuan atau ancaman, kerja sama, dan hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan.

Pada dasarnya, kesejahteraan dan kemiskinan adalah dua mata uang yang sama, tidak peduli di mana mereka diletakkan. Sebenarnya, ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak mampu mencapai kesejahteraan, yang menyebabkan mereka miskin. Sutrisno (1995), seorang sosiolog, mengatakan bahwa "dalam pandangan agrarian populist", negara adalah penyebab utama kemiskinan. Menurut pandangan ini, masalah budaya mengatakan bahwa orang miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, jiwa wiraswasta, dan rendahnya pendidikan..

Berdasarkan berbagai teori dan konsep yang ada, kemiskinan pada dasarnya adalah ketika sebuah masyarakat tidak memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara materi atau nonmateri. Bantuan tidak hanya secara materi; masyarakat juga membutuhkan bantuan yang dapat menghentikan mereka dari keterpurukan dan kemiskinan yang tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan, dibutuhkan upaya untuk

menggal potensi diri melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

2.4. UKURAN KEMISKINAN

BPS (2000) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah yang dikonsumsi setiap orang, yaitu 2100 kalori per hari, dari 52 jenis makanan yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk di lapisan bawah. Selain itu, ada juga konsumsi non-makanan, yang terdiri dari 45 jenis makanan yang sesuai dengan kesepakatan nasional dan tidak membedakan antara kota dan pedesaan. Semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, dan perkiraan status fisiologis seseorang dapat menggunakan patokan kecukupan 2100 kalori ini. Garis kemiskinan juga merujuk pada ukuran ini. Orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan disebut miskin.

Tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi menjadi wilayah pedesaan dan perkotaan, menurut Sayogyo dalam Suryawati (2005). Daerah perkotaan: Kategori kemiskinan terdiri dari: (a) Miskin, bila pengeluaran keluarga kurang dari 320 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun; (b) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga kurang dari 240 kilogram nilai tukar

beras per orang per tahun; atau (c) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga kurang dari 180 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun. Di daerah pedesaan, kategori kemiskinan terdiri dari: (a) Miskin, bila pengeluaran keluarga kurang dari 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun. (b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun. (c) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Bank Dunia menggunakan pendapatan untuk menentukan garis kemiskinan. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari dianggap miskin (Suryawati, 2005). Menurut Mubyarto, klasifikasi kemiskinan lebih cenderung berdasarkan sisi ekonomi: mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.75.000 per bulan di pedesaan dan Rp.108.000 per bulan di perkotaan, atau 75% dari penghasilan mereka untuk membeli beras, adalah miskin.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melihat masalah dari perspektif kesejahteraan daripada kemiskinan, bertentangan dengan klasifikasi kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS (BKKBN, 2005). BPS menggunakan rumah tangga sebagai unit survei, sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Dalam program pembangunan dan pengentasan kemiskinan,

pendataan keluarga dilakukan untuk mendapatkan data kependudukan dan keluarga. Pentahapan keluarga sejahtera, yang dibagi menjadi lima tahap, digunakan untuk mengumpulkan data kemiskinan:

- Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin)
- Keluarga Sejahtera I (miskin)
- Keluarga Sejahtera II
- Keluarga Sejahtera III
- Keluarga Sejahtera III plus

Tahapan Pra Sejahtera; Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salahsatu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.

Tahapan Keluarga Sejahtera I; Keluarga baru dapat memenuhi ciri-ciri berikut: (1) Semua anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (2) Anggota keluarga mengenakan pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian; (3) Rumah keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik; (4) Seorang anggota keluarga sakit dibawa ke fasilitas kesehatan; (5) Pasangan usia subur yang ingin melakukan KB dibawa ke fasilitas pelayanan kontrasepsi; dan (6) Semua anak di rumah memiliki makanan sendiri.

Tahapan Keluarga Sejahtera II; Keluarga ini harus memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 hingga 6) dan indikator berikut: (7) Semua anggota keluarga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (8) Setiap minggu seluruh keluarga makan daging, ikan, atau telur; (9) Setiap anggota keluarga mendapatkan paling kurang satu pasang pakaian baru setiap tahun; dan (10) Luas lantai rumah setiap penghuni harus paling kurang 8 meter persegi. (11) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing; (12) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan; (13) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin; (14) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Tahapan Keluarga Sejahtera III; Keluarga ini harus memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator 1 hingga 6) dan indikator berikut: (7) Setiap anggota keluarga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (8) Setiap minggu keluarga makan daging, ikan, atau telur; (9) Setiap anggota keluarga mendapatkan paling kurang satu pasang pakaian baru setiap tahun; dan (10) Luas lantai rumah setiap penghuni harus setidaknya 8 meter persegi.

Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus; Keluarga ini memenuhi kriteria Tahapan Keluarga Sejahtera I, Indikator Keluarga Sejahtera II, dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1 hingga 19), serta kriteria berikut: (20) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan uang untuk kegiatan sosial; (21) Satu atau lebih anggota keluarga berpartisipasi dalam organisasi sosial, yayasan, atau lembaga masyarakat.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN PERKOTAAN

3.1. PENDAHULUAN

Berbagai perspektif tentang kemiskinan, sebagian besar bergantung pada keadaan ekonomi rumah tangga. Dalam kebanyakan kasus, seseorang dianggap "miskin" jika mereka menghadapi kekurangan materi dan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, dan pakaian, sedangkan seseorang dianggap "kaya" jika mereka memiliki sejumlah besar harta benda. Selain pemahaman ekonomi-sentris kemiskinan, masyarakat juga memiliki konsep kehidupan yang baik dan buruk, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, fisik, dan emosional. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tua atau sakit, tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan, terkucilkan secara sosial, tidak memiliki pasangan, dan merasa lemah atau terancam adalah semua tanda kehidupan yang buruk. Sebaliknya, kehidupan yang baik ditandai dengan terpenuhinya semua kebutuhan dan tidak mengalami kekurangan apa pun.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, penyebab kemiskinan di Kecamatan Alang-Alang Lebar sangat beragam. Berbagai faktor saling berkaitan, seperti tingkat

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses ke barang dan jasa, dan kondisi lingkungan, memengaruhi keadaan ini. Selama ini, dapat dikatakan bahwa kemiskinan hanya diukur dari aspek materi, seperti tingkat pendapatan, aset yang dimiliki, bentuk fisik rumah, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki atau perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasar mereka untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat juga dapat dianggap miskin.

3.2. FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Di kalangan masyarakat umum, ada yang beranggapan karakteristik rumah tangga miskin dalam pandangan yang lebih luas dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Menurut Rodgers (1969), karakteristik rumah tangga miskin di perkotaan adalah modal usahanya tidak ada dan posisi tawar menawarnya rendah. Ada kecenderungan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rumah tangga miskin, hal ini terlihat pada persyaratan untuk mengakses modal atau pinjaman kredit pada lembaga keuangan.

Berdasarkan pada pengamatan (observasi) dan penelitian. Penyebab kemiskinan di perkotaan dilihat dari tiga modal yang dimiliki, yaitu:

1.Modal Ekonomi.

a).Terjualnya Asset Produktif

Ada beberapa penyebab masyarakat menjual aset produktif.

➤ **Menjual aset dengan keterpaksaan.**

Daerah perkotaan dipenuhi dengan aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan gedung, perumahan, dan infrastruktur. Tanpa disadari, kegiatan tersebut memerlukan pembebasan tanah atau lahan yang dimiliki penduduk. Akibatnya, penduduk harus menjual tanah atau aset mereka. Penduduk akan kehilangan sumber mata pencaharian mereka jika tanah yang dimiliki merupakan sumber pendapatan.

➤ **Ganti rugi yang diterima secara fisik tidak sesuai.**

Adakalanya ganti rugi yang diberikan oleh pengembang atau pihak terkait tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga mereka yang telah menjual aset/tanah tidak mampu membeli aset/tanah dengan kualitas yang sama.

➤ **Menjual aset produktif secara sukarela.**

Tidak semua penduduk mau menjual tanah/aset karena adanya kegiatan pembangunan (penggusuran). Ada juga mereka yang menjual karena keinginan pribadi untuk kepentingan keluarga atau kebutuhan lainnya.

b).Rendahnya Pendapatan

Pendapatan yang rendah sehingga tidak ada sisa pendapatan untuk ditabung untuk mengembalikan modal usaha. Jika Anda ingin meminjam pada bank mereka, itu sulit untuk dilakukan karena persyaratannya rumit dan mereka memerlukan jaminan yang tidak sesuai dengan standar bank.

2.Modal Manusia

Modal manusia atau *Human Capital* diperkenalkan oleh Milton Friedman. *Human Capital* merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Peningkatan human capital ini dapat dilakukan dengan pelatihan berbasis pengetahuan yang berkelanjutan dan merumuskan pengembangan strategi setiap individu sebagai kontribusi untuk perusahaan. Adapun penyebab kemiskinan dilihat dari modal manusia, meliputi :

a). Rendahnya Pendidikan Formal

Pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang karena banyak pengetahuan, ilmu, dan informasi yang terus diperoleh. Pendidikan membantu orang bersosialisasi dengan lingkungannya. Pendidikan adalah

penting untuk meningkatkan martabat manusia karena memberi orang kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengatur hidup mereka secara wajar. Banyak masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan formal, sehingga pendidikan formal tidak dapat dilakukan.

Pada dasarnya, biaya pendidikan formal sangat sulit bagi masyarakat miskin, yang mengakibatkan tingkat pendidikan formal rata-rata rendah dan bahkan jumlah orang yang menamatkan pendidikan tinggi masih rendah.

b).Rendahnya Tingkat Keterampilan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan atau keterampilan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Kondisi memungkinkan menambah angka pengangguran dan mempengaruhi tingkat pendapatan.

c).Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat dapat menjadi penyebab dalam kemiskinan kultural yaitu berupa nilai-nilai, tradisi-tradisi yang dikembangkan secara kultural, dan pandangan hidup yang berkembang di antara mereka. Ada pola-pola

kelakuan dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang miskin sebagai suatu cara yang paling tepat untuk dapat tetap melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan. Cara hidup ini yang kemudian menjadi landasan bagi terbentuknya kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki. Misalnya di Kecamatan Alang-Alang Lebar, ada satu kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang sangat minim, di mana hasil kerja mereka cukup untuk kehidupan sehari-hari, tidak lebih dari itu. Akan tetapi, pada saat menikahkan anak, mereka mengadakan pesta meriah dan musik (organ tunggal). Kadang untuk mencukupi biaya pesta tersebut ditutupi dari hasil berhutang. Hal ini dilakukan hanya merupakan tradisi di lingkungan mereka dan merupakan bentuk “aktualisasi diri” (data lapangan, 2012).

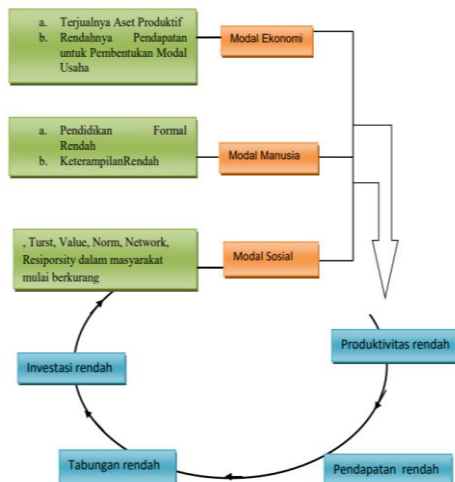
3.Modal Sosial

Modal Sosial meliputi *Tust, Value.Norm, network dan resiporsty*. Keberadaan modal sosial nyaris hilang, terutama pada daerah perkotaan .Modal Sosial yang lemah akan meredupkan kepercayaan, semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran. Pada akhirnya masyarakat yang berpendapatan rendah cenderung menutup diri dalam lingkungan masyarakat.

Ketiga hal tersebut dianggap turut andil sebagai penyebab kemiskinan di Kecamatan Alang-Alang Lebar yang akan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Logika berpikir yang dinyatakan Nurkse dalam Kuncoro (2000), negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Fenomena kemiskinan akan terus berlanjut tanpa ada hentinya saling kait mengkait dan saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya secara melingkar. Demikian halnya, kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Alang-alang Lebar akan melingkar dalam bentuk lingkaran setan kemiskinan dan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)



Sumber: Data Lapangan Diolah, 2020

Proses kemiskinan itu berawal dari adanya hilangnya aset produktif, keterbatasan modal, keterbatasan pendidikan, keterbatasan keterampilan budaya masyarakat yang akan mengakibatkan ketertinggalan dan keterbelakangan. Berdasarkan pada beberapa hal tersebut, membawa implikasi (dampak) terhadap rendahnya produktivitas individu “diri”. Rendahnya produktivitas ini akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima individu miskin. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan kecenderungan menurunkan investasi. Dampak selanjutnya, investasi yang rendah akan semakin memperparah ekonomi dan berakibat pada keterbelakangan dan ketertinggalan sosial ekonomi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan di Kecamatan Alang-Alang Lebar seharusnya diarahkan untuk “memangkas” lingkaran dari perangkat kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuncoro (2000).

BAB IV

FENOMENA MASYARAKAT MISKIN ABU-ABU DI PERKOTAAN

4.1.PENDAHULUAN

Menurut Sulistiani (2004), kemiskinan memiliki banyak aspek. Kemiskinan bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga masalah kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakberdayaan, yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya. Dalam setiap negara, kemiskinan selalu menjadi masalah utama. Kemiskinan memiliki banyak aspek yang kompleks.

Teori Marxisme menyatakan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang menerapkan ekonomi pasar bebas (Howard & King, 1989). Dalam masyarakat, orang kaya biasanya memiliki lebih banyak harta daripada orang miskin. Ini karena dalam pasar bebas, hanya mereka yang mampu menawarkan harga yang lebih tinggi yang dapat menjual barang tersebut. Prinsip ini menghasilkan komponen pengeluaran seperti tanah, yang biasanya dimiliki oleh golongan terkaya karena kuasa pembelian yang lebih besar. Orang-orang yang kaya akan menjadi lebih kaya karena mereka memiliki faktor produksi ini, dan mereka akan terus membeli faktor produksi tambahan sehingga golongan terkaya memonopoli seluruh faktor

produksi. Akibatnya, masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki faktor produksi yang produktif.

4.2. MASYARAKAT “MISKIN ABU-ABU”

Seringkali, definisi miskin hanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi, seperti pekerjaan yang tidak produktif atau pendapatan yang rendah. Tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram beras yang dikonsumsi setiap orang setiap tahun, dan dibagi menjadi wilayah perkotaan dan pedesaan, menurut Sayogyo (dalam Suryawati 2005). Daerah perkotaan: tingkat kemiskinan termasuk: (a) Sebuah keluarga dianggap miskin jika pengeluarannya kurang dari 480 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun. (b) Jika pengeluarannya lebih kecil dari 380 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun, itu dianggap miskin sekali. (c) Jika pengeluarannya lebih kecil dari 270 kilogram nilai tukar beras per orang per tahun, itu dianggap sebagai yang paling miskin. Pada dasarnya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan dasar, tetapi juga dari sudut pandang kebijakan yang tidak menguntungkan kelompok tertentu. Kelompok tersebut merasa ditinggalkan karena kondisi ini.

Masyarakat dikatakan miskin dapat ditinjau dari beberapa pandangan dan kriteria. Sebagai study kasus, BKKBN menetapkan kriteria masyarakat miskin di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kriteria yang ditetapkan oleh BKKBN adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Keluarga Sejahtera I diklasifikasikan jika memenuhi lima kriteria berikut: yaitu: (1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik; (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan; (5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; (6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah, sedangkan kriteria keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima kriteria tersebut.

Dalam suatu wilayah bila tidak ada kriteria keluarga pra sejahtera, masyarakat miskin sering disebut sebagai keluarga sejahtera I (KS I). Semakin banyak masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut berarti semakin banyak masyarakat miskin, dan semakin sedikit masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut berarti semakin sedikit masyarakat miskin. Jumlah populasi miskin yang dilaporkan sangat mempengaruhi jumlah bantuan dari

pemerintah (raskin) atau pihak lain yang akan diterima. Kondisi ini juga akan mempengaruhi program-program yang dilaksanakan pemerintah. Setiap ada bantuan dan program-program untuk masyarakat miskin, masyarakat yang tergolong masyarakat miskin tentu akan mendapat prioritas. Sejauh ini yang diberikan bantuan raskin dan program lain dari pemerintah adalah pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KS I). Kenyataan secara riil di lapangan, ada kelompok lain yang selama ini kurang mendapat perhatian dan selalu berada di posisi “sulit”. Masyarakat yang termasuk di kelompok ini sangat riskan bila terjadi perubahan situasi dan kondisi serta kebijakan yang dikeluarkan, cenderung membuat masyarakat tersebut berada pada posisi benar-benar miskin, sehingga kelompok masyarakat miskin tersebut menyebut kelompok ini adalah masyarakat “miskin abu-abu”.

Kriteria BKKBN menilai kesejahteraan suatu keluarga. Keluarga yang tidak memenuhi kriteria tersebut dianggap tidak sejahtera, atau miskin, tetapi keluarga yang memenuhi kriteria kesejahteraan dianggap tidak miskin. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan total empat belas standar, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kriteria yang ditetapkan oleh BKKBN dibandingkan dengan kondisi masyarakat “miskin abu-abu” dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
 Kriteria Miskin BKKBN dan Kondisi Masyarakat
 “Miskin Abu-bu”

Kriteria Miskin BKKBN	Kondisi Masyarakat Miskin “Abu-Abu”	Keterangan
(1)Keluarga biasanya makan dua kali sehari atau lebih.	Semua anggota keluarganya makan lauk sederhana tiga kali sehari.	Sejahtera, meskipun hanya lauk sederhana
(2)Semua anggota keluarga mengenakan pakaian yang berbeda saat berada di rumah, bekerja, pergi ke sekolah, atau bepergian.	Setiap keluarga mengenakan pakaian unik untuk setiap acara.	Sejahtera
(3)Rumah keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik..	Lantai rumah terbuat dari keramik dan semen. Atap biasanya memiliki plafon dan terbuat dari genteng.dari kayu, meskipun dindingnya terbuat dari batu bata dan	Semua informan memiliki rumah yang layak huni berdasarkan kondisi fisiknya. Papan membentuk lantai rumah Ibu Zuriah. Bapak Deni, Bapak Arif,

	diplester. Penerangan listrik dan air minum berlangganan (PAM), kompor gas. minimal memiliki TV.	dan Bapak Oji tinggal di rumah yang dialokasikan secara sewa.
(4)Jika seseorang dalam keluarga sakit dan dibawa ke fasilitas kesehatan;	Karena biaya rendah, anggota yang sakit dibawa ke puskesmas.	Sejahtera
(5)Pasangan usia subur dapat pergi ke fasilitas pelayanan kontrasepsi jika mereka ingin melakukan KB;	Kadangan tidak menggunakan alat kontrasepsi karena Anda harus membayar untuk menggunakannya	Kurang sejahtera
(6)Semua anggota keluarga dari usia 7 hingga 15 tahun diizinkan untuk bersekolah..	Semua siswa mendaftar di sekolah negeri yang tidak membutuhkan SPP.	Sejahtera
(7)Keluarga biasanya beribadah sesuai dengan	dapat melakukan ibadah kapan pun diperlukan	Sejahtera

agama dan kepercayaan masing-masing.		
(8) Semua anggota keluarga harus memakan daging, ikan, atau telur setidaknya sekali seminggu.	Ada orang yang bisa makan ikan dan telur sebulan sekali dalam seminggu.	Kurang makmur
(9) Dalam setahun, setidaknya satu pasang pakaian baru diberikan kepada setiap anggota keluarga.	Setiap anggota memiliki kemampuan untuk membeli pakaian baru setiap tahun.	kriteria ini termasuk keluarga yang sejahtera atau miskin.
10) Setiap penghuni harus memiliki luas lantai minimal 8 meter persegi.	Luas lantai rumah masing-masing individu rata-rata 6 m ²	tidak dianggap miskin berdasarkan luas lantainya. Namun ada status penyewa.
11) Keluarga telah dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka selama tiga bulan	Sebagian besar dari mereka baru saja mengalami masalah kesehatan satu bulan sebelumnya.	Kurang makmur

terakhir karena mereka dalam keadaan sehat.		
(12)Seorang atau lebih anggota keluarga bekerja untuk mendapatkan uang.;	Sopir, pedagang sayur, ojek, adalah contoh pekerjaan informal yang tidak cukup.	kurang sejahtera karena bekerja di tempat kerja yang tidak stabil dan menghasilkan gaji yang tidak pasti Penghasilan bulanan antara 500.000 dan 955.000
(13)Semua anggota keluarga yang berusia antara 10 dan 60 tahun dapat membaca tulisan latin;	Anggota keluarga tertentu tidak dapat membaca dan menulis.	kurang makmur
14)Pasangan yang menggunakan alat kontrasepsi atau obat untuk mencegah kehamilan memiliki lebih dari satu anak.	Pasangan tidak selalu menggunakan alat kontrasepsi.	kurang makmur

Sumber: Hasil data lapangan diolah, 2020

Kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BKKBN biasanya menggunakan ukuran fisik atau materi. Kondisi rumah yang dihuni sangat terlihat. Pada umumnya, orang-orang dari kelompok yang disebut sebagai "miskin abu-abu" memiliki rumah yang layak huni dan dalam kondisi baik. Untuk menentukan seberapa miskin suatu keluarga, tidak hanya ukuran rumahnya, tetapi juga sejarah kepemilikan rumah dan tanahnya. Siapa sebenarnya pemilik rumah? Bagaimana rumah tersebut diperoleh? Menurut pengalaman nyata di lapangan, beberapa anggota masyarakat miskin—menerima rumah dari berbagai sumber, seperti hibah, warisan orang tua, atau menyewa rumah dengan orang lain.

Kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria BKKBN. Masyarakat miskin yang termasuk dalam kategori ini akan menerima bantuan langsung dari program penanggulangan kemiskinan perkotaan seperti Program Bantuan Keluarga Miskin (GAKIN), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan PNPM. Namun, masyarakat yang disebut sebagai "miskin abu-abu" tidak akan menerima bantuan langsung dari program ini. Hal ini karena mereka dianggap tidak termasuk miskin, selain itu ada juga "miskin abu-abu" tidak mempunyai identitas resmi karena sebagai pendatang.

Data dan observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat "miskin abu-abu" kurang mendapat perhatian yang cukup dari program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Selain itu, masyarakat "miskin abu-abu" ini berada di posisi yang sangat riskan karena mereka dapat menjadi masyarakat yang benar-benar miskin jika ada kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM. Selain itu, masyarakat "miskin abu-abu" ini rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap, yang berarti mereka pada dasarnya lebih banyak dari masyarakat miskin yang terdata.

Salah satu alasan mengapa masyarakat berada di posisi "miskin abu-abu" ini adalah karena mereka kehilangan aset produktif, baik secara terpaksa oleh keadaan maupun secara sukarela untuk memenuhi keinginan masyarakat sendiri, serta faktor lain seperti PHK. Masyarakat "miskin abu-abu" harus mampu bangkit dan berusaha menjadi lebih mandiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain dalam situasi seperti ini. Melakukan pemberdayaan diri sesuai dengan potensi Anda dapat membantu mengatasi keterpurukan dan kemiskinan. Konstruksi sosial realitas sosial dibuat oleh manusia. Akibatnya, kebenaran realitas sosial adalah relatif dan berlaku dalam konteks tertentu yang dianggap relevan oleh pelaku sosial.

BAB V

KESIMPULAN

Masyarakat "miskin abu-abu" tidak mendapat perhatian yang cukup dari program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Selain itu, masyarakat "miskin abu-abu" ini berada di posisi yang sangat riskan karena mereka dapat menjadi masyarakat yang benar-benar miskin jika ada kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM. Selain itu, masyarakat "miskin abu-abu" ini rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap, yang berarti mereka pada dasarnya lebih banyak dari masyarakat miskin yang terdata.

Salah satu penyebab masyarakat berada di posisi "miskin abu-abu" ini karena kehilangan aset produktif baik karena terpaksa oleh keadaan maupun sukarela atas keinginan masyarakat sendiri, ada juga terkena PHK dan faktor lainnya. Masyarakat "miskin abu-abu" mempunyai posisi keterbatasan secara materi maupun akses. Keterbatasan ini terkadang membuat masyarakat "miskin abu-abu" tidak mempunyai pilihan selain harus lebih berdaya untuk bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan.

Adapun kriteria masyarakat miskin abu-abu yang terdapat di perkotaan dengan mengacu pada kriteria BKKBN meliputi: (1) Semua anggota keluarganya

makan 3 kali sehari dengan lauk sederhana, (2) Setiap Keluarga memiliki baju yang berbeda untuk setiap aktivitas, (3) Lantai rumah terdiri dari kayu, semen dan keramik. Dinding rumah terdiri dari batu bata dan diplester, (4) Anggota yang sakit dibawa ke puskesmas, karena biaya dianggap ringan, (5) Tidak semua menggunakan alat kontrasepsi karena harus mengeluarkan biaya bila ingin menggunakan alat kontrasepsi, (6) Semua anak usia 7-15 tahun bersekolah di sekolah negeri yang bebas SPP, (7) Dapat menjalankan ibadah tergantung kebutuhan, (8) Seminggu sekali makan ikan dan telur bahkan ada yang sebulan sekali mampu makan ikan, (9) Seluruh anggota mampu membeli pakaian baru satu tahun satu kali, (10) Luas lantai rumah rata-rata 6 m² atau kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah, (11) Sebagian besar baru mengalami masalah kesehatan satu bulan yang lalu, (12) Kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah. Pekerjaan yang digeluti tidak menentu (serabutan), sebagai sopir, pedagang sayur, ojek. Pekerjaan yang lakukan tidak cukup satu dan semua adalah sektor informal, (13) Tidak semua anggota keluarga usia 10-60 mampu membaca dan menulis, (14) Tidak semua pasangan menggunakan alat kontrasepsi.

Selain itu, masyarakat miskin “abu-abu” cenderung kurang memiliki aset produktif, kurangnya informasi dan keterampilan, mata pencahariannya tidak menentu atau

serabutan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini membuat masyarakat miskin “abu-abu” harus bekerja lebih giat lagi untuk meningkatkan taraf hidup dan bangkit dari keterpurukan atau lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiasari.2008. *Analisis Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Kerdung Jaya, Kec. Tanah Sereal Kota Bogor*. Tesis IPB tidak dipublikasikan.
- Amiri, Mojtaba. 2009. *Role of empowerment and younght involvement in poverty eradication*, <http://www.infed.org/thinkers/mojtaha.htm>, 20 Pebruari 2011
- Ashral, Nova. 2010. *Female Empowerment : impact of commitment saving product in the Philippines*, [http://www.infed.org/thinkers/ Nova Ashral,.htm](http://www.infed.org/thinkers/NovaAshral,.htm), 20 Pebruari 2011
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian kualitatif Perspektif Mikro, Insan Cendekia Surabaya*,
- Bastaman, H.D. 1996. *Meraih Hidup Bermakna: Kisah Pribadi dengan Pengalaman Tragis*, Paramadina, Jakarta
- Berenger, Valeria & Audrey Verdier Chauchane, 2007.*Multidimensional Measure of Well-Being: Standard of living and Quality of Life Cross Countries*. World Development. Vol. 35, No. 7
- BKKBN, 2009. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2009*, BKKBN, Jakarta

- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interaction, Perseptive and Method*, EnglewoCliff. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Biro Pusat Statistik, 2011. *Angka Kemiskinan Indonesia*, Jakarta
- Biro Pusat Statistic, 2011. *Palembang Dalam Angka*, Palembang
- Bourdieu, Pierre. 1986, *The Forms of Capital” dalam John G. Richardson. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York : Greenwood Press.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofisdan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Charon, Joel, M. 1998. *Symbolic Interactionism. Perspektive and Method* Prentice-Hall Inc. USA
- Charon, Joel, M. 1999. *The Meaning of Sociology, A Reader (ed)*.Sixth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prencite Hall.
- Chuzu, 2002. *Social capita effect on poverty and technical efficiency rural Kawazula Natal South Africa*.<http://www.bepress.com/cg?> Journal, 20 Maret 2011

- Coleman, James. 1986. Social Theory, Social Research and a Theory of Action. *The American Journal of Sociology* P.91
- Coleman, James. 1998. Social Capital I The Creation Of Human Capital. *The American Journal of Sociology* P.94
- Coleman, James. 1994. *Foundation of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cox, E. 1995. *A Truly Civil Society*. ABC Books. Sydney
- Dasgupta, P. 1988. *Trust as a Commodity dalam Gambetta, ed, Trust: Making and Breaking cooperative Relations*. Oxford: Blackwell.
- Downs, 2007. *A Systematic Integrated Approach for Crafting Poverty and Sustainable Development Projects*. <http://www.bepress.com/htm>, 20 Maret 2011
- Elster, John. 1989. Social Norms and Economic Theory. *Journal of Economic Perspektif*, no. 3
- Francois, P, 2003. *Social Capital and Economic Development*. London : Routledge.
- Friedman, Jhon. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Cambridge Mass, Blackwell Publisher.
- Fukuyama, F, 1995. *Trust, Social Capital Virtues and The Creation of Prosperity*. Free Press. New York

- Fukuyama, F. 1999. *Social Capital and Civil Society*. Institute of Public Policy. George Mason, University.
- Fukuyama, F. 2002. *The Great Disruption: Hakekat Manusia dan Rekonstruksi Tatahan Sosial*. CV. Qalam, Yogyakarta
- Dorodjatun, JK. 1994. *Kemiskinan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Grootaert, C, 1999. *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*, Lokal Level Institutions. Working Paper No. 6. World Bank.
- Grootaert, C dan Van Bastelaer. 2002. *Understanding and Measuring Social Capital: A Syntesis of Findings and Recommendations from The Social Capital Initiative*. Washington. D.C, World Bank
- Grootaert, Christiaan, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock. 2004. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. Washington, D.C. : The World Bank
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR-United Press
- Hewitt, John P, 1991. *Self And Society: A Symbolic Interactionist Social Psychology*. Fifth E dition. Boston: Allyn And Bacon.

- Jensens, Wendy. 2010. *Women empowerment in the creation the social capital in India village*, didownload dari <http://epn.org/prospect/.html>, 20 Maret 2011.
- Jensen, Hans. 1987. *The Theory of Human Nature*, *journal of Economics*, Issues 21
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Pertama. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2005. *SNPK Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Krishna, Anirudh, 2010, *The Irrelevance of nation strategis? Rural poverty, dynamic India (1993-2005)*, India, download dari <http://www.bepress.com/cg?Article>, 15 Juni 2011
- Lewis (1969) *Memahami kemiskinan dan ciri-cirinya sebagai suatu kebudayaan*.
- Lin, N. 1999. *Social Network and Status Attainment*, *Annual Review of Sociology*, Vol. 25
- Lin, Nan. 2002. *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Marianti, Ruly, 2009. Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara dan Timor Barat, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta
- Mead, George Herbert. 1934. *Mind, Self and Society*. Chicago: The University of Chicago Press. First Phonix Edition, 1967.
- Mead, George Herbert. 1934. *On Psycology*. Chicago: The University of Chicago Press. Fourth Impression. 1972
- Mulyono, Sungkowo, 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*, Jurnal Edukasi No.1. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang,
- Narayan, Deepa dan Michael F. Cassidy. 2001. "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory". Dalam *Current Sociology*, Vol 49 (2), Maret.
- Narayan, D dan Pritchett, L. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. World Bank, Washington D.C.
- Narayan, D dan Pritchett, L. 1999. *Cent and Socialibility: Household Income and social Capital In Tanzania*. Economic Development and Culture Change

- Pearse, Andrew and Michael Stiefel, 1979. *Inequality into Participation A Research Approach*, Geneva, UNRISD
- Prijono & Pranaka, 1996, *Pemberdayaan-Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Center For Strategic and International Studies (CSIS)
- Poloma, Margareta M, 1994, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, *Rajawali Press*.
- Putnam, Robert. 1993. *The Prosperous Community-Social Capital and Public Life, The American Prospect*.
- _____. 1995. *Tuning In, Tuning Out : The Strange Disappearance of Social Capital in America*. Political Studies Vol. 4 No. 28.
- _____. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and revival of American Community*, *Journal of Political Science and Politics*.
- Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (www.indonesia.go.id).
- Rodgers, G, 1996. *Social Exclusion: Retic, Reality Respons*. International Institute for Labor Studies, New Yor
- Rutherford, M, 1994. *Institutional in Economics: The old and The New Institutional*, UK: Cambridge, University Press.

- Rohima, Siti, 2009. *Analisis ketimpangan Fiskal Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, Juni 2009, Universitas Sriwijaya
- _____, 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan*, *Jurnal Spasial, Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 8, NO.2. Desember 2010, Universitas 45 Makasar
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Reflika Aditama, Bandung.
- Sulistiyani, AT. 2000, *Problema dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan*, dalam, *JSP*, Vol.5, No.3
- Sumanta, Jaka, 2005. *Fenomena Lingkaran Kemiskinan Indonesia*, Analisis Ekonomi Regional Data Panel Provinsi Tahun 1999-2002
- Suparlan Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Suparlan, Dr. Parsudi (penyunting): *Kemiskinan Di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*; 1984. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Suparlan, Parsudi : *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*; (buku kumpulan tulisan Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D. In Memorium, editor : Chrysnanda. DL dan Yulizar Syafri); 2008. Jakarta. Penerbit JPKIK.

- Suryana. 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Suryawati, 2005. *Garis kemiskinan menurut pendapatan*.
- Uphoff, N. 1999. *Understanding Social Capital: Learning From The Analysis and Experience of Participation*. Dalam *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. P. Dasgupta dan I. Seragelden (editor). Washington D.C.
- UNDP, 1995. *Public Sector Management, Governance and Sustainable Development*, New York: UNDP
- World Bank, 2001. *World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press, hal 34
- Zack, P. J. dan Knack, S. 2001. *Trust and Growth*. *Economic Journal*, 111:
- Zafirovski, Milan. 2000. *Economics and Sociological Approach to Institutions: Economy, Society and Law*. *European journal of Law and Economic*, July 2000

PROFIL PENULIS



Dr. Siti Rohima, SE, M.Si. Pendidikan formal pada Strata S1 ditempuh pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan selesai tahun

1993. Melanjutkan Strata S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2009. Strata S3 ditempuh pada Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2013. Menjadi Dosen jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya sejak tahun 1996. Aktif diberbagai kegiatan penelitian, pengabdian dan penulisan jurnal. Penulis juga aktif sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palembang dan Pengurus Ikatan Cendekianwan Muslim Indonesia (ICMI) Cabang Sumatera Selatan. Buku yang telah diterbitkan diantaranya Ekonomi Publik, Ekonomi Moneter, Dampak Pandemi COVID 19 bagi Perekonomian Indonesia, Kewirausahaan di Era Society 5.0, Bank dan lembaga Keuangan Syariah, Ketersediaan Infrastruktur, Pendapatan dan Ketahanan Pangan di Sumatera Selatan



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos, M.PA. Pendidikan formal pada Strata S1 ditempuh pada Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sriwijaya

(UNSRI) dan selesai tahun 1993. Melanjutkan Strata S2 pada Jurusan: Ilmu-Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta tahun 2008. Strata S3 ditempuh pada Program Doktor Studi: Ilmu Administrasi, Minat Kekhususan: Administrasi Publik di Universitas Brawijaya (UB), Malang tahun 2016. Menjadi Dosen jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya sejak tahun 1993. Aktif diberbagai kegiatan penelitian, pengabdian, penulisan jurnal, koran dan narasumber. Aktif dalam kepengurusan HIMMPAS dan anggota KAGAMA UGM.

ISBN 978-623-399-181-0



9 786233 991810